

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maros, 15 Juli 2025
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan,



A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
NIP. 197707112005021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran dan Daftar	64



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512
TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppidbrpbappmaros@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maros, 15 Juli 2025
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan,



Dr. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
NIP. 197707112005021001

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara semester I tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp426.778.078 atau mencapai 26,28 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.623.862.000.

Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2025 adalah sebesar Rp52.043.398.570 atau mencapai 53.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp97.096.937.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I Tahun 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp466.156.790.011 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp152.809.169; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp271.035.656.922; Properti Investasi Rp. 194.700.230.807 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp268.093.113.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.780.106.079 dan Rp463.376.683.932.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp408.848.575, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp58.489.608.024 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp58.080.759.449. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp197.289.664) dan Rp58.278.049.113 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp58.278.049.113.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp470.038.112.553 ditambah Defisit-LO sebesar Rp58.278.049.113 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp51.616.620.492 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp463.376.683.932.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25		Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Angg	30-Jun-24
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
PENDAPATAN Negara dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	1.623.862.000	426.778.078	1.197.083.922	26,28	772.744.576
JUMLAH PENDAPATAN dan Hibah		1.623.862.000	426.778.078	1.197.083.922	26,28	772.744.576
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	81.233.143.000	47.081.508.524	34.151.634.476	57,96	45.566.396.568
Belanja Barang	B.4	15.863.794.000	4.961.890.046	10.901.903.954	31,28	9.548.646.120
Belanja Modal	B.5	-	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		97.096.937.000	52.043.398.570	45.053.538.430	53,60	55.115.042.688

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
NERACA****PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	31-Des-24
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	12.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	2.411.738	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih_Piutang Bukan Pajak	C.1.7	-	
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		2.411.738	-
Persediaan	C.1.10	138.397.431	255.903.616
Jumlah Aset Lancar		152.809.169	255.903.616
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	110.842.685.316	110.842.685.316
Peralatan dan Mesin	C.2.2	28.521.572.819	29.121.416.469
Gedung dan Bangunan	C.2.3	100.329.035.541	100.638.185.541
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	108.111.969.736	108.111.969.736
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	745.515.000	745.515.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	122.384.000	122.384.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(77.637.505.490)	(74.992.911.670)
Jumlah Aset Tetap		271.035.656.922	274.589.244.392
PROPERTI INVESTASI			
Properti Invesstasi		198.950.544.273	198.950.544.273
Akumulasi penyusutan properti inverstasi		(4.250.313.466)	(3.980.053.590)
Jumlah Properti Investasi		194.700.230.807	194.970.490.683
ASET LAINNYA	C.4		
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.4.1	-	302.149.826
Aset lain lain	C.4.2	2.061.306.600	1.661.453.950
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.793.213.487)	(1.317.979.560)
Jumlah Aset Lainnya		268.093.113	645.624.216
JUMLAH ASET		466.156.790.011	470.461.262.907
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang pada Pihak Ketiga	C.5.2	2.768.106.079	423.150.354
Utang yang belum ditagihkan	C.5.3	-	
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	12.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.780.106.079	423.150.354
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	463.376.683.932	470.038.112.553
JUMLAH EKUITAS		463.376.683.932	470.038.112.553
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		466.156.790.011	470.461.262.907

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	30-Jun-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	408.848.575	701.583.700
JUMLAH PENDAPATAN		408.848.575	701.583.700
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	49.780.548.683	48.256.239.052
Beban Persediaan	D.3	213.408.685	769.469.715
Beban Barang Jasa	D.4	4.510.599.330	7.604.555.476
Beban Pemeliharaan	D.5	368.439.814	1.058.090.868
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.316.294	426.020.717
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.612.295.218	3.963.319.912
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		(54.827)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		58.489.608.024	62.077.640.913
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(58.080.759.449)	(61.376.057.213)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit pelepasan aset non lancar	D.12	(276.666.405)	58.591.750
Pendapatan pelepasan aset non lancar		10.267.000	62.873.000
Beban pelepasan aset non lancar		286.933.405	4.281.250
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional lainnya		79.376.741	35.059.916
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		79.376.741	35.059.916
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Lainnya		(197.289.664)	93.651.666
SURPLUS/DEFISIT Kegiatan Non Operasional		(58.278.049.113)	(61.282.405.547)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(58.278.049.113)	(61.282.405.547)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-25	30-Jun-24
EKUITAS AWAL	E.1	470.038.112.553	477.041.502.756
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(58.278.049.113)	(61.282.405.547)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	-	253.947.982
PENYESUAIN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
KOREKSI Nilai aset Non Revaluasi	E.4.5	-	253.947.982
KOREKSI Lain-Lain	E.4.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	51.616.620.492	54.080.414.178
kenaikan/penurunan ekuitas		(6.661.428.621)	(6.948.043.387)
EKUITAS AKHIR		463.376.683.932	470.093.459.369

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Makmur Dg. Sitakka No.129, Maros.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

A.1.1. Struktur Organisasi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 75/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPBAPPP

Berdasarkan struktur organisasi maka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swadaya, dan Swasta;
- c. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsional Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air

Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

A.1.2 SDM BRPBAPPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBAPPP. BRPBAPPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air payau dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

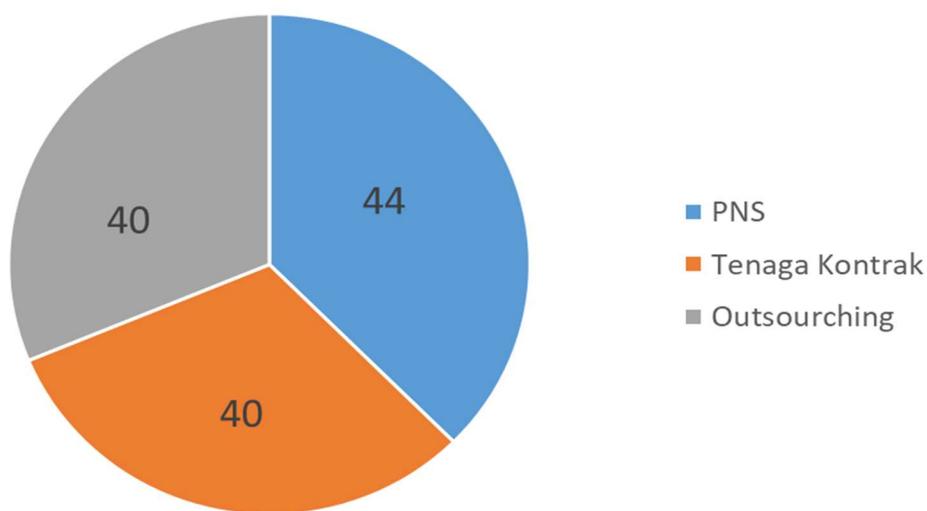
Dalam rangka mengakselerasi tugas BRPBAPPP tersebut, masing-masing pegawai/pejabat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal diantaranya diklat, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Administrasi dan pengelolaan kepegawaian juga dituntut melakukan tugas pokok dan fungsinya secara cermat, untuk mendukung administrasi dan karier kinerja PNS berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: tanggal/bulan pengangkatan,

kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, program pengembangan pegawai melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan jabatan, pelatihan dan pendidikan keterampilan.

Sistem pengadministrasian di kepegawaian dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga administrasi pegawai dapat terdokumentasikan dengan baik dan data kepegawaian dapat tersaji secara tepat, baik dan akurat.

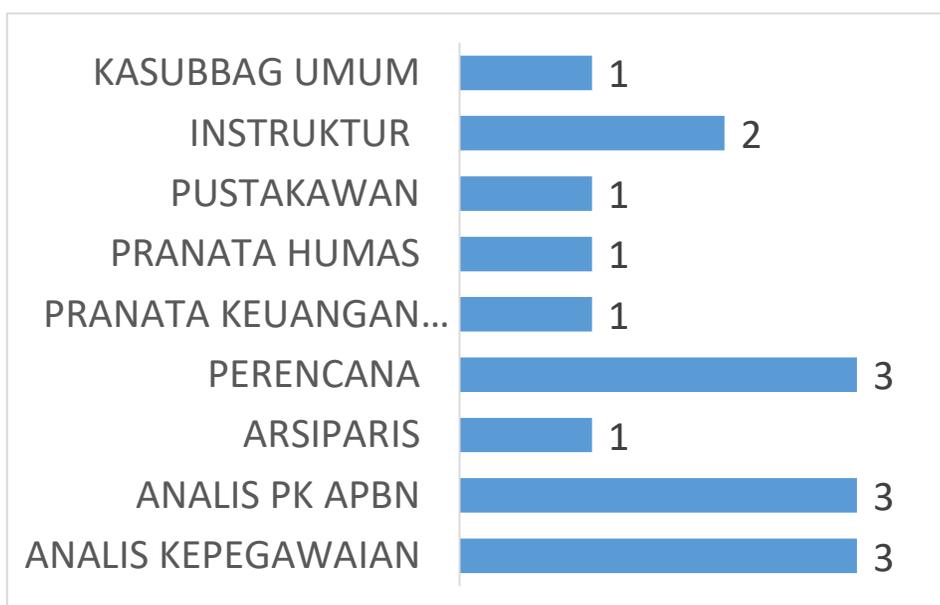
Kinerja suatu unit kerja dapat dicapai dengan optimal apabila masing-masing pegawai/pejabat melaksanakan tugas secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, maka perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan non formal diantaranya diklat, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan mutlak sangat diperlukan. Pegawai BRPBAPPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat dasar (SD). sampai dengan pasca sarjana (S3) yang ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Perbenihan Budidaya Udang Windu di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada bulan maret tahun 2023 sebanyak 388 orang yang terdiri dari 44 orang PNS Manajerial, PNS Penyuluh Perikanan 388 orang dan P3K Penyuluh sebanyak 39 orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 195 orang. Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Riset Perbenihan Budidaya Udang Windu Di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Sedangkan para penyuluh perikanan tersebar di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi

Tenggara

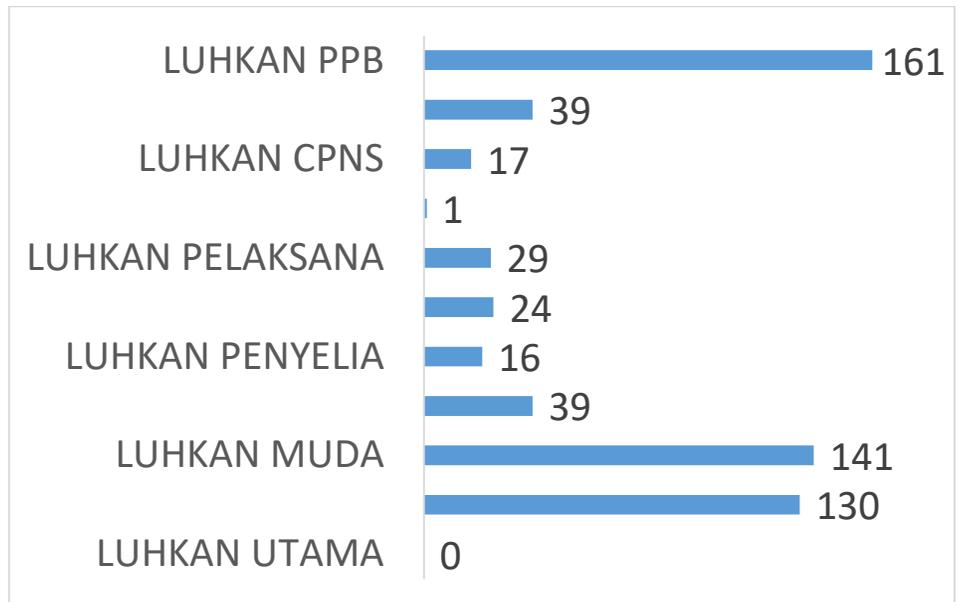


Grafik 1. Data Kepegawaian Bulan Maret 2023

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Maret 2023 total SDM BRPBAP-PP sebanyak 471 orang. Sebaran Outsourcing terdiri dari 17 orang Manajerial dan Laboratorium, 4 orang Driver, 2 orang Satpam, 17 orang Cleaning Service.



Grafik 2. Jabatan Fungsional Umum: 18 orang



Grafik 3. Total Luhkan PNS : 381 orang dan Total Luhkan CPNS : 17 orang

a. Menurut Golongan

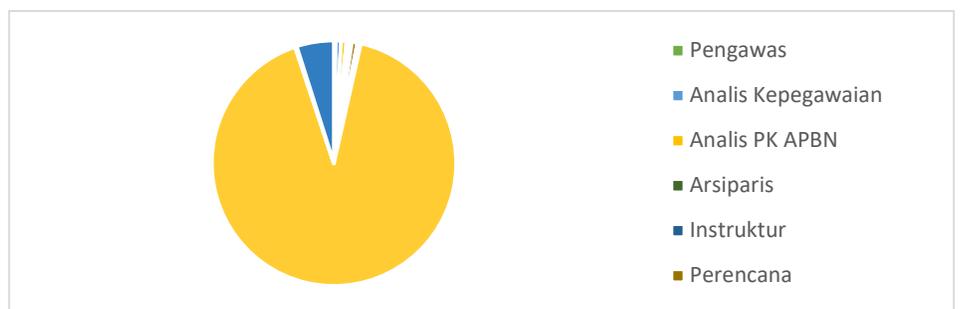
Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 100 orang (2 orang riset dan 98 orang penyuluh), Golongan III sebanyak 276 orang (24 orang riset dan 252 orang penyuluh), Golongan II sebanyak 49 orang (11 orang riset dan 38 orang penyuluh), dan Golongan I tidak ada.



Grafik 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

b. Menurut Struktural dan Fungsional

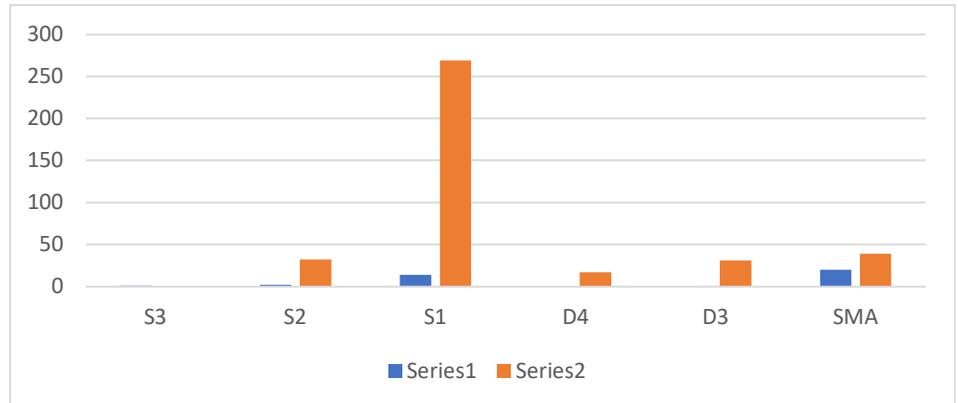
Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pengawas (Struktural) 1 orang, Analis Kepegawaian 3 orang, Analis PK APBN 3 orang, Arsiparis 1 orang, Instruktur 2 orang, Perencana 3 orang, Pranata Humas 1 orang, Pranata Keuangan APBN 1 orang, Penyuluh Perikanan 388 orang, Pustakawan 1 orang, dan Fungsional Umum 21 orang.



Grafik 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

c. Menurut Pendidikan

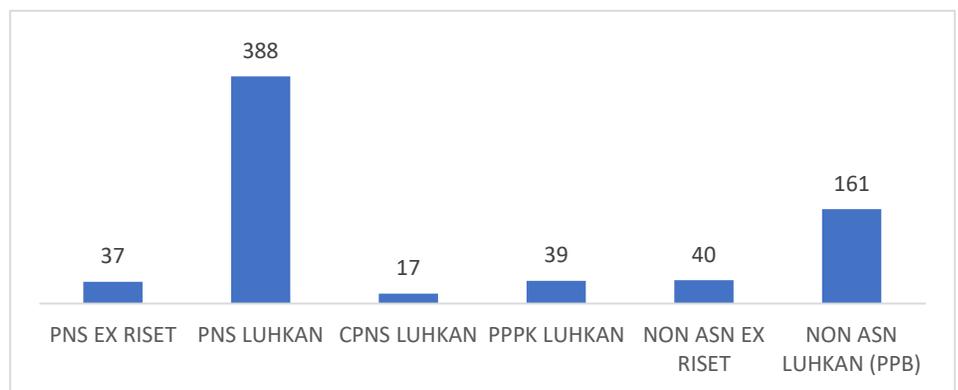
Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 34 orang, S1/D4 sebanyak 300 orang, D3 sebanyak 31 orang, SLTA sebanyak 59 orang.



Grafik 6. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

d. Menurut Status Kepegawaian

Jumlah pegawai menurut status kepegawaian sebanyak 682 orang yang terdiri dari: CPNS/PNS sebanyak 442 orang yang terdiri dari 37 orang dari ex riset dan sebanyak 405 orang dari penyuluhan; PPPK sebanyak 39 orang dari penyuluhan; Tenaga Kontrak sebanyak 201 orang yang terdiri dari 40 orang pegawai kontrak dari ex riset dan sebanyak 161 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu).

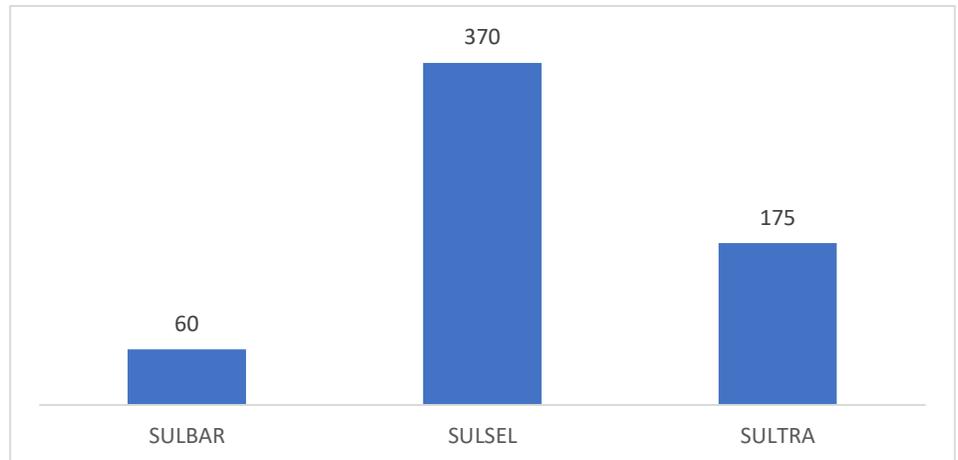


Grafik 7. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

e. Persebaran Penyuluh

Jumlah Penyuluh Perikanan (ASN dan PPB) secara keseluruhan ada 605 orang, dengan rincian Penyuluh Perikanan ASN di setiap wilayah penyebarannya adalah sebagai berikut : Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 281 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 127 orang,

Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 36 orang serta Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 161 orang terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 89 orang, wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 48 orang dan Sulawesi Barat sebanyak 24 orang.



Grafik 8. Grafik Jumlah Penyuluh Berdasarkan Wilayah Penyebarannya

A.1.3 Aset/ Sarana Prasarana



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan** adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp110.071.024.000. Selama Semester I tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal BRPBAPPP yang disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	1.623.862.000	1.623.862.000
Jumlah Pendapatan	1.623.862.000	1.623.862.000
Belanja		
Belanja Pegawai	81.233.143.000	81.233.143.000
Belanja Barang	16.504.151.000	15.863.794.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	97.737.294.000	97.096.937.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp426.778.078

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp426.778.078 atau mencapai 26,28 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.623.862.000. Pendapatan di satuan kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Semester I TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	1.200.265.000	309.563.800	25,79
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	135.000.000	17.057.946	12,64
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	288.597.000	48.808.000	16,91
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	2.027.000	-
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	0	2.500.000	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	0	30.150.000	0
Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9.697.398	0
Jumlah	1.623.862.000	426.778.078	26,28

Realisasi pendapatan BRPBAPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya dimana estimasi pendapatannya sebesar Rp.309.563.800 dengan realisasi sebesar Rp.1.200.265.000.
- Pengembalian Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi lainnya sebesar Rp.30.150.000
- Pendapatan Sewa, Gedung dan Bangunan senilai Rp. 48.808.000
- Pendapatan penjualan peralatan dan mesin Rp. 2.027.000 berupa Penjualan peralatan dan mesin sesuai risalah lelang No.731/15.02/2024-01 tanggal 12 juni 2024.
- Pendapatan penjualan hasil produksi litbang sebesar Rp.2.500.000.

- Penerimaan Kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.9.697.398

Keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BRPBAPPP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015.

Keseluruhan pendapatan yang diterima BRPBAPPP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan telah ditatausahakan oleh bendahara penerimaan dan di setorkan ke kas Negara baik melalui surat bukti setoran pajak maupun dengan pemotongan surat perintah membayar. Merujuk pada aturan penyetoran PNBP, satker BRPBAPPP telah menggunakan aplikasi SIMPONI dan MPN G2 dalam pengelolaan Penyetoran Penerimaan Negara.

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 44,77 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh anggaran Smart Fisheries Village terkena dampak efisiensi anggaran yang mempengaruhi setoran PNBP tidak berjalan optimal.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	309.563.800	561.259.650	-44,84
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.027.000	62.873.000	-96,77
Pendapatan dari Penjualan Gedung dan Bangunan	8.240.000	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	48.808.000	33.524.010	45,59
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	14.646.208	956.500	16.833
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	30.150.000	20.660.000	45,93
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	2.500.000	82.506.000	-

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	768.829	0	-
Penerimaan kembali belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.697.398	10.965.416	-
Penerimaan kembali belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	376.843	0	-
Jumlah	426.778.078	772.744.576	-44,77

Realisasi Belanja
Rp52.043.398.570

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp52.043.398.570 atau 45,63% dari anggaran belanja sebesar Rp.97.096.937.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	81.233.143.000	47.081.508.524	57,96
Belanja Barang	15.863.794.000	4.961.890.046	31,28
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	97.076.937.000	52.043.398.570	53,60
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	97.076.937.000	52.043.398.570	53,60

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 5,57 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

Efisiensi Anggaran menyebabkan kegiatan operasional perkantoran, Smart Fisheries Village tidak berjalan pada Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	47.081.508.524	45.566.396.568	3,33

Belanja Barang	4.961.890.046	9.548.646.120	-48,04
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	52.043.398.570	55.115.042.688	-5,57

Belanja Pegawai
Rp.47.081.508.524

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp47.081.508.524 dan Rp45.566.396.568. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS serta PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,32 persen dari TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	16.041.645.800	15.651.641.400	2,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	214.699	231.919	-7,43
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.116.032.830	1.091.258.640	2,27
Belanja Tunj. Anak PNS	358.719.208	349.886.714	2,52
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000	14.400.000	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.146.932.000	3.162.914.000	-0,51
Belanja Tunj. PPh PNS	345.264.480	328.707.754	5,04
Belanja Tunj. Beras PNS	794.881.920	786.626.400	1,05
Belanja Uang Makan PNS	1.665.793.000	1.650.823.000	0,91
Belanja Tunj. Umum PNS	35.900.000	27.945.000	28,47
Belanja Uang Lembur	22.273.000	-	-
Belanja Tunjangan Kinerja	23.541.978.195	22.501.974.144	4,62

Jumlah Belanja Kotor	47.084.035.132	45.566.408.611	0,20
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.526.608)	(12.043)	0
Jumlah Belanja	47.081.508.524	45.566.396.568	3,32

Belanja Barang
Rp4.961.890.046

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.961.890.046 dan Rp9.548.646.120. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami kenaikan 14,16 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan, antara lain: Bertambahnya lokasi kegiatan Smart Fisheries Village pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	481.267.690	721.783.041	-33,32
Belanja Barang Non Operasional	1.997.252.626	4.195.392.539	-52,39
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	26.600.000	912.565.780	-97,08
Belanja Jasa	2.084.013.622	2.237.861.098	-6,87
Belanja Pemeliharaan	368.439.814	1.094.065.868	-66,32
Belanja Perjalanan Dinas	4.316.294	386.977.794	-98,88
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	4.961.890.046	9.548.646.120	-48,04
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	4.961.890.046	9.548.646.120	-48,04

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat anggaran serta realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Peenambahan Nilai Gedung Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0. Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi beberapa Gedung Kantor satker lingkup Kantor Wilayah Akuntansi untuk menampung para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.000

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat berupa adanya peningkatan jaringan radio untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal
Lainnya Rp.000*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2025. Belanja modal lainnya berupa pengadaan *software* untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Software	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp000*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 dan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp152.809.169

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp152.809.169 dan Rp255.903.616.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp12.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Jun 2025	31 Des 2024
Uang Tunai	0	0
Uang Persediaan RM	12.000.000	0
Uang Persediaan PNPB	0	0
Tambahahn Uang Persediaan RM	0	0
Jumlah	12.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp000. dan Rp000, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Jun 2025	31 Des 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Jun 2025	31 Des 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0s	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp2.411.738

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.411.738 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Jun 2025	31 Des 2024
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	2.411.738	0
Jumlah	2.411.738	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Piutang bukan Pajak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berasal dari Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM No. 293 tanggal 6 Juni 2024 SP2D No. 251361501001916 tanggal 1 Juli 2025 untuk Pembayaran belanja pegawai berupa gaji induk Manajerial bulan juli 2025 untuk 44 pegawai/141 jiwa dasar akrual.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Jun 2025	31 Des 2024
1.	TP/TGR	0	-
2.		0	0
3.		0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Jun 2025	31 Des 2024
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
2.		0	-
3.		0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di
Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa

telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	30 Jun 2025	31 Des 2024
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Jenis	30 Jun 2025	31 Des 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp138.397.431

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp138.397.431 dan Rp255.903.616 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	30 Jun 2025	31 Des 2024
Barang Konsumsi	27.450.700	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Bahan Baku	98.232.656	252.868.855
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	12.714.075	97.424.800
Jumlah	138.397.431	255.903.616

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah di lakukan opname terhadap semua item persediaan dan ditatausahakan dalam sakti modul persediaan

Aset Tetap
Rp271.035.656.922

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp271.035.656.922 dan Rp274.589.244.392.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp110.842.685.316

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp110.842.685.316 dan Rp110.842.685.316

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Awal	110.842.685.316
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi BMN Ke Properti Investasi	0
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2025	110.842.685.316
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-

Nilai Buku Per 30 Juni 2025	110.842.685.316
------------------------------------	------------------------

Keseluruhan aset tetap berupa tanah yang dimiliki BRPBAPP sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Saldo tanah per 30 Juni 2025 sebagian dilakukan reklasifikasi BMN ke Properti Investasi berdasarkan laporan hasil pendampingan Inspektorat V KKP terkait identifikasi asersi Properti Investasi.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Luas (M2)	Lokasi	Nilai
26.660	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros (Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	15.162.209.000
19.627	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros (Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	12.843.418.000
39.308	Dusun Manrimisi Maros (ITP Marana Kab Maros) Perumahan Maranak	1.833.325.000
323.251	JL Makmur Dg Sitakka NO 129 Maros (Kel.Raya) Kantor Maros	229.980.946.500
127.445	Desa Punaga Takalar, Tambak Takalar	3.280.944.000
445.000	Desa Mattiro Tasi, Tanah Tambak dan Kantor Maranak	15.562.763.000
1.609	Desa Lawallu Kec Soppeng Riaja Barru, Tanah tambak	925.239.000
1.208	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah Perumahan	539.976.000
90.000	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah kantor	2.449.116.000
15.692	Desa Mattirotasi Kec. Maros Baru Tanah untuk Jalan Kompleks	1.220.791.000
	Jumlah	110.842.685.316

Peralatan dan
Mesin
Rp28.521.572.81
9

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.521.572.819 dan Rp29.121.416.469.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	29.121.416.469
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Perolehan Lainnya	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	599.843.650

Penghapusan	
Saldo Per 30 Juni 2025	28.521.572.819
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(26.970.195.746)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	1.551.377.073

Pengurangan Peralatan dan Mesin berupa Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp.599.843.650 terdiri dari :

1. Kendaraan dinas 2 unit sebesar Rp.235.500.000.
2. Pompa angin sebanyak 55 unit sebesar Rp.332.593.650.
3. Pompa Lainnya sebanyak 1 unit sebesar Rp.23.500.000
4. Kipas angin sebanyak 3 unit sebesar Rp.8.250.000

Gedung dan
Bangunan
Rp100.329.035.5
41

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp100.329.035.541 dan Rp100.638.185.541.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	100.638.185.541
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
Penhentian aset dari penggunaan	309.150.000
Saldo Per 30 Juni 2025	100.638.185.541
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(24.171.401.467)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	76.466.784.074

Mutasi Tambah :

-

Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penggunaan berupa :

1. Rumah negara Type D sebanyak 3 unit sebesar Rp.228.034.000
2. Rumah negara Type E sebanyak 2 unit sebesar Rp.81.116.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp108.111.969.736

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp108.111.969.736 dan Rp108.111.969.736 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	108.111.969.736
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2025	108.111.969.736
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(21.974.861.912)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	86.137.107.824

Mutasi tambah:

-

Aset Tetap Lainnya
Rp745.515.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp745.515.000 dan Rp745.515.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	745.515.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 30 Juni 2025	745.515.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	745.515.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp122.384.000

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp122.384.000 dan Rp122.384.000 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya pada Balai Riset Perikanan

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shirmp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah(Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dari SUPM Bone sebesar Rp.78.760.000.

Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya reconfusing anggaran. Konstruksi Dalam Pengerjaan telah terbit persetujuan penghapusan sesuai surat Kepala KPKNL Makassar No. S-183/MK/KNL.1502/2025 tanggal 7 Juli 2025.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp77.637.505.490

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.637.505.490 dan Rp74.992.911.670

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

Tabel xx

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	28.521.572.819	26.970.195.746	1.551.377.073
2.	Gedung dan Bangunan	100.638.185.541	24.171.401.467	76.466.784.074

3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.111.969.736	26.495.908.277	86.137.107.824
4.	Aset Tetap Lainnya	745.515.000	0	745.515.000
	Jumlah	238.017.243.096	77.637.505.490	160.379.737.606

Properti Investasi
Rp194.700.230.807

C.3. Properti Investasi

Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp194.700.230.807 dan Rp194.970.490.683

Properti Investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Properti Investasi
Rp.198.950.544.273

C.3.1. Properti Investasi

Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.198.950.544.273 dan Rp.198.950.544.273

Tabel xx

Rincian Properti Investasi

30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025	31 Des 2024
1.	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	15.562.763.000	15.562.763.000
2.	Tanah Sawah Irigasi	157.393.279.184	158.104.741.628
3.	Bangunan Kolam/Bak Ikan	25.994.502.089	25.994.502.089
	Jumlah	198.950.544.273	198.950.544.273

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
Rp.4.250.313.466

C.3.1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Balai Riset perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.4.250.313.466 dan Rp.3.980.053.590.

Tabel xx

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Properti Investasi	198.950.544.273	4.250.313.466	194.700.230.807
	Jumlah	198.950.544.273	4.250.313.466	194.700.230.807

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.4. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	31 Des 2024
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	-

	Jumlah	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.4.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker 31 Juni Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang TPA 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	31 Des 2024
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.4.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.

Panjang

30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			

Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp268.093.113

C.5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp268.093.113 dan Rp645.624.216

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.5.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Paten)	0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		0
Mutasi kurang:		
Penghapusan		0
Saldo Per 30 Juni 2025		0
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025		(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025		0

Mutasi kurang:

-

Aset Lain-Lain
Rp2.061.306.600

C.5.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.061.306.600 dan Rp1.661.453.950. Aset Lain-lain berupa

Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.661.453.950
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	908.993.650
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	509.141.000
-	0
Saldo Per 30 Juni 2025	2.061.306.600
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	(1.793.213.487)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	268.093.113

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.793.213.487

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.793.213.487 dan Rp1.317.979.560. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	0	0	0
2.	Hak Cipta	0	0	0
2.	Paten	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	2.061.306.600	1.793.213.487	268.093.113
	Jumlah	2.061.306.600	1.793.213.487	268.093.113
	Total	2.061.306.600	1.793.213.487	268.093.113

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp2.780.106.079

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.780.106.079. dan Rp423.150.354.

Uang Muka dari
KPPN Rp12.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Uang Muka dari KPPN 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Jun 2025
1.	Uang Persediaan BRPBAPPP RM	12.000.000
2.	Uang Persediaan BRPBAPPP PNPB	0
3.	Tambahan Uang Persediaan BRPBAPPP RM	0
	Jumlah	12.000.000

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp2.768.106.079

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.768.106.079 dan Rp423.150.354. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Pada penyajian laporan periode ini terdapat adanya utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.768.106.079 yang disebabkan oleh akrual belanja pegawai pada bulan Juli 2025.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.768.106.079
Total		2.768.106.079

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Pendapatan Diterima di Muka 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Badan Swasta	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	0	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
Jumlah	0	

Utang Yang belum ditagihkan Rp0

C.5.4. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Utang yang belum ditagihkan
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Jun 2025	31 Des 2024
Utang yang belum ditagihkan	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas

Rp463.376.683.932

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp463.376.683.932 dan Rp470.038.112.553. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp701.583.700*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp701.583.700 dan Rp768.110.301. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2025	30 Jun 2024	%
Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan	48.808.000	36.201.550	34,82
Pendapatan Penggunaan Sarana/prasarana sesuai dengan Tusi	14.646.208	956.500	-0,99
Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya.	309.563.800	561.259.650	-0,06
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	2.500.000	2.506.000	0
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya.	30.150.000	20.660.000	-1.32
Jumlah	408.848.575	701.583.700	-41,72

Pendapatan akrual pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp49.780.548.68*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.780.548.683 dan Rp48.256.239.052. Beban Pegawai adalah beban

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan informasi LO beban pegawai pada periode laporan 30 Juni 2025 mengalami penurunan 3,16 % dibanding periode Juni 2024 adanya pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia.

Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2025	30 Jun 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	16.041.645.800	17.636.475.100	-9,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	214.699	245.267	0,04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.116.032.830	1.229.258.180	0,11
Beban Tunj. Anak PNS	358.719.208	393.842.234	0,08
Beban Tunj. Struktural PNS	14.400.000	16.200.000	2,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.146.932.000	3.562.818.000	0,03
Beban Tunj. PPh PNS	345.264.480	336.670.951	1,76
Beban Tunj. Beras PNS	794.881.920	885.551.760	0,02
Beban Uang Makan PNS	1.665.793.000	1.660.852.200	-0,02
Beban uang lembur	22.273.000	0	0,00
Beban Tunj. Umum PNS	35.900.000	31.415.000	-0,49
Beban Tunjangan Kinerja	23.577.878.195	22.502.910.360	0,32
Jumlah Beban	49.780.548.683	48.256.239.052	3,16
Pengembalian Beban	0	0	0
Jumlah Beban	49.780.548.683	48.256.239.052	3,16

Beban Persediaan
Rp213.408.685

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp213.408.685 dan Rp769.469.715. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	65.042.500	357.400.500	-81,80
Beban Persediaan Bahan Baku	59.121.410	221.366.915	-73,29
Beban Persediaan Lainnya	89.244.775	190.702.300	-53,20
Jumlah Beban	213.408.685	769.469.715	-72,26

Beban persediaan pada periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan signifikan 72,26% karena tidak adanya kegiatan Smart Fisheries Village di beberapa lokasi lingkup BPPSDM.

Beban Barang dan Jasa
Rp4.510.599.330

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.510.599.330 dan Rp7.604.555.476. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah

disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2025	30 Jun 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	406.692.490	533.280.781	-23,74
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	37.163.500	1,73
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	125,200	1.113.520	0,69
Beban Honor Operasional Satker	73,900,000	86.935.000	0,14
Beban Barang Operasional Lainnya	550,000	129.348.000	0,18
Beban Bahan	3,367,246	632.820.366	0,20
Beban Honor Output Kegiatan	1,993,885,380	2.103.400.000	0,15
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1.788.148.992	0,14
Beban Langganan Listrik	567,855,711	625.715.745	0,05
Beban Langganan Telepon	601,465	489.363	0,05
Beban Langganan Air	27,691,100	19.341.800	0,72
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	39,880,631	24.461.596	0,07
Beban Sewa	58,200,000	156.000.000	0,57
Beban Jasa Profesi	0	2.200.000	-0,29
Beban Jasa Lainnya	1,389,784,715	1.459.236.813	1,65
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	0	4.900.000	0
Jumlah Beban	4.510.599.330	7.604.555.476	-40,68

Beban barang dan jasa pada 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan 40,68% dibanding 30 Juni 2024, hal ini disebabkan karena mengalami efisiensi anggaran.

Beban
Pemeliharaan
Rp368.439.814

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp368.439.814 dan Rp1.058.090.868. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295,479,826	717.431.023	-58,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72,959,988	340.659.845	-78,58
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	368.439.814	1.058.090.868	-65,18

Pengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap aset yang di kelola untuk mempertahankan kondisi dan masa manfaat aset dalam rangka menunjang kegiatan operasional balai.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.316.294

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.316.294 dan Rp426.020.717. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya

frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.316.294	419.945.717	-0,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	450.000	-0,89
Beban Perjalanan Dinas -Pandemi Covid19	0	2.125.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3.500.000	0,94
Jumlah Beban	4.316.294	426.020.717	-98,98

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni Tahun 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual	0	0	0
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.612.295.218

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.612.295.218 dan Rp3.963.319.912. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	386,328,247	1.229.225.638	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,386,020,869	1.636.928.425	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.548.382.087	189.137.887	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yg digunakan dalm operasi Pemerintah	0	65.793.158	0
Jumlah Penyusutan	3.612.295.218	3.963.319.912	-8,86
Beban Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
Beban Amortisasi Paten	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	3.612.295.218	3.963.319.912	-8,86

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp54.827) dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	-54,827	0)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	-54,827	-100

Kegiatan Non Operasional
Rp93.651.666

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-276.666.405	58.591.750	1,78
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	79.376.741	35.059.916	-2789,03
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah Beban	-197.289.664	93.651.666	-310,66

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp470.038.112.553*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing adalah sebesar Rp470.038.112.553 dan Rp477.041.502.756.

*Defisit LO
Rp58.278.049.113*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp58.278.049.113 dan Rp61.282.405.547. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0

4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp253.947.982.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 30 Juni 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	(0)
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain 30 Juni 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp51.616.620.492 dan Rp54.080.414.178

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas 30 Juni 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	426,778,078
Ditagihkan ke Entitas Lain	(52,043,398,570)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	51.616.620.492

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp426.778.078 sedangkan DKEL sebesar Rp52.043.398.570.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel xx
Transfer Masuk 30 Juni 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	-	0
2.	Persediaan	-	0
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Pengesahan Hibah Langsung 30 Juni 2025

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	Uang	0
2.	-	Uang	0
		Barang	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Ekuitas Akhir
Rp463.376.683.9
32

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp463.376.683.932 dan Rp470.093.459.369

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat catatan kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Masih terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan 30 Juni 2025. Konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.122.384.00 yang berupa:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shrimp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah (Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)

Konstruksi Dalam Pengerjaan telah terbit persetujuan penghapusan sesuai surat Kepala KPKNL Makassar No. S-183/MK/KNL.1502/2025 tanggal 7 Juli 2025.

2. Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air

Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.198.950.544.273 dan Rp.198.950.544.273

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Tabel xx

Rincian Properti Investasi

30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025	31 Des 2024
1.	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	15.562.763.000	15.562.763.000
2.	Tanah Sawah Irigasi	157.393.279.184	158.104.741.628
3.	Bangunan Kolam/Bak Ikan	25.994.502.089	25.994.502.089
	Jumlah	198.950.544.273	198.950.544.273